



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu pedoman pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - b. bahwa agar pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diterapkan secara aplikatif dan implementatif serta partisipatif perlu melakukan penyelarasan dengan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah, yang dipimpin oleh Panewu.
2. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah pedoman teknis operasional Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang dibentuk dan disusun berdasarkan musyawarah Kalurahan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
11. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagai perwujudan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagai bagian wilayah administrasi kalurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kalurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagai bagian wilayah administrasi kalurahan yang terdiri dari beberapa RT dalam rangka mengoordinasikan kegiatan RT.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMKal adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan dalam rangka menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan.
15. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan dalam rangka pembangunan masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan dalam rangka pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial, terutama generasi muda di wilayah Kalurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Kalurahan.
17. Pos Pelayanan Terpadu atau sebutan lain Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman pembentukan LKK.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. mengoptimalkan peran LKK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - b. mendudukan fungsi LKK sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - c. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kalurahan; dan
 - d. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kalurahan dalam membantu pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Muskal.
- (3) Pembentukan LKK diatur dalam Peraturan Kalurahan.
- (4) Pemerintah Kalurahan wajib menyediakan ruang/tempat untuk setiap LKK pada tingkat Kalurahan.

- (5) Persyaratan pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kalurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kalurahan;
 - d. memiliki kepengurusan;
 - e. memiliki sekretariat; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (6) Contoh bentuk format Peraturan Kalurahan tentang LKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

LKK berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan meliputi bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

- (1) LKK mempunyai tugas:
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
 - b. mengikuti proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK menyampaikan usulan rencana kegiatan kepada Pemerintah Kalurahan.

- (3) Tata cara penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme perencanaan di Kalurahan.

Pasal 6

LKK mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat kalurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 7

- (1) LKK terdiri dari:
- a. RT;
 - b. RW;
 - c. LPMKal;
 - d. PKK;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Posyandu.
- (2) Pemerintah Kalurahan dapat membentuk LKK selain LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan perkembangan Kalurahan.

- (3) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat dibentuk secara berjenjang pada tingkat:
- a. Kalurahan; dan/atau
 - b. wilayah.

Bagian Kedua

RT

Pasal 8

- (1) RT merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (2) Tujuan pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. melestarikan nilai-nilai budaya gotong royong di masyarakat;
 - b. memelihara nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. membantu serta meningkatkan kinerja pemerintah di wilayah Kalurahan;
 - d. meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah Kalurahan; dan
 - e. melaksanakan kegiatan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat yang ada.
- (3) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari wilayah administrasi di Kalurahan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh RT, Pemerintah Kalurahan wajib melakukan pemetaan wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) RT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. membantu dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. membantu pelaksanaan pendataan kependudukan;
- d. membantu pelayanan administrasi pemerintahan;
- e. membantu penyelesaian permasalahan masyarakat;
- f. membantu terwujudnya ketentraman dan ketertiban;
- g. mengembangkan aspirasi masyarakat dan memotivasi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengikuti dan menyampaikan pendapat pada forum rapat musyawarah RT;
- h. mengoordinasikan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan;
- i. menghubungkan antar warga masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan dan/atau Pemerintah Daerah melalui pertemuan yang dihadiri kepala keluarga di wilayah RT setempat untuk menyampaikan dan menerima informasi pembangunan;
- j. menggerakkan gotong royong, potensi swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi kelembagaan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(6) RT mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga;

- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 9

- (1) Pemecahan, penggabungan dan penghapusan RT dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan RT baru akibat pemecahan dan penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) kepala keluarga.
- (3) Pemecahan, penggabungan dan penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. usulan masyarakat;
 - b. dampak terjadinya bencana; dan/atau
 - c. dampak pembangunan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (5) Pemecahan, penggabungan dan penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Keluarga (KK) atau yang mewakili, Pengurus RT, Pengurus RW dan wakil Kalurahan.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara dan dilampiri dengan daftar hadir peserta musyawarah paling kurang 50 % (lima puluh perseratus) Kepala Keluarga.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Lurah dan BPK.
- (8) Pemecahan, penggabungan dan penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kalurahan.

- (9) Contoh bentuk Format Berita Acara Hasil Musyawarah Pemecahan dan Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

RW

Pasal 10

- (1) RW merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi RT.
- (2) RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari wilayah administrasi di Kalurahan.
- (3) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh RW, Pemerintah Kalurahan wajib melakukan pemetaan administrasi RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tujuan pembentukan RW yaitu:
- a. melestarikan nilai-nilai budaya gotong royong di masyarakat;
 - b. memelihara nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. membantu serta meningkatkan kinerja pemerintah di wilayah Kalurahan;
 - d. meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah Kalurahan; dan
 - e. menjadi sarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat yang ada.
- (5) RW mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja;
 - b. membantu pelayanan administrasi pemerintahan;

- c. membantu dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
 - e. mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan melalui rapat/musyawarah antar pengurus RT yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kalurahan dan BPK;
 - f. menghubungkan antar warga masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Kalurahan dan Pemerintah Daerah;
 - g. memotivasi RT di wilayahnya dalam rangka menggerakkan gotong royong, potensi swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi kelembagaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (6) RW mempunyai fungsi:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 11

- (1) Pemecahan dan penggabungan RW dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan RW baru akibat pemecahan dan penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.

- (3) Pemecahan, penggabungan dan penghapusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. usulan masyarakat;
 - b. dampak terjadinya bencana; dan/atau
 - c. dampak pembangunan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (5) Pemecahan, penggabungan dan penghapusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Keluarga (KK) atau yang mewakili, Pengurus RT, Pengurus RW dan wakil Kalurahan.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Lurah dan BPK.
- (8) Pemecahan, penggabungan dan penghapusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kalurahan.
- (9) Berita Acara Musyawarah Pemecahan dan Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

LPMKal

Pasal 12

- (1) LPMKal merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kalurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan dengan swadaya gotong-royong.

- (2) Tujuan pembentukan LPMKal yaitu untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan.
- (3) LPMKal mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Padukuhan;
 - c. mengikuti penyusunan rencana pembangunan Kalurahan;
 - d. mengoordinasikan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan dengan swadaya, partisipasi dan gotong royong;
 - e. mengidentifikasi, menginventaris dan melaporkan rencana swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 - f. mengidentifikasi, menginventaris dan melaporkan realisasi swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 - g. membantu melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi kelembagaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (4) LPMKal mempunyai fungsi:
- a. pendorong rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - b. pengkoordinasi perencanaan pembangunan di tingkat Padukuhan;
 - c. pengkoordinasi kegiatan antar LKK dalam pemberdayaan dan pembangunan;

- d. perencana aktif dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
 - e. penggalian potensi dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mendukung pembangunan di Kalurahan.
- (5) Contoh bentuk Format Laporan Rencana Swadaya Masyarakat dan Contoh bentuk Format Laporan Realisasi Swadaya Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F dan Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

PKK

Pasal 13

- (1) PKK merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui Gerakan PKK.
- (2) Penyelenggaraan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK.
- (3) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.

- (4) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
- (5) PKK mempunyai tugas meliputi:
- a. menyusun rencana kerja;
 - b. melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK di Padukuhan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai kebijakan yang telah ditetapkan;
 - d. melaksanakan kegiatan penyuluhan yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - e. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - f. mengikuti secara aktif pelaksanaan program Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kalurahan;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
 - h. melaksanakan administrasi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (6) PKK mempunyai fungsi:
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. perencana, pelaksana, fasilitator, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Keenam
Karang Taruna

Pasal 14

- (1) Karang Taruna merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

- (2) Tujuan pembentukan Karang Taruna yaitu:
- a. mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
 - b. membentuk jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
 - c. menumbuhkan potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna;
 - d. memotivasi setiap generasi muda Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - e. menjalin kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
 - f. mewujudkan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Kalurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya; dan
 - g. mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Kalurahan yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan bersama Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.
- (3) Karang Taruna mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja;
 - b. menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
 - d. melaksanakan administrasi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

- (4) Karang Taruna mempunyai fungsi:
- a. pencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda;
 - b. penyelenggara kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat terutama generasi muda;
 - c. peningkatan usaha ekonomi produktif;
 - d. penumbuh, pemerkuat dan pemelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - e. penumbuh, pemerkuat dan pemelihara kearifan lokal; dan
 - f. pemelihara dan pemerkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketujuh

Posyandu

Pasal 15

- (1) Posyandu merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kalurahan.
- (2) Dalam menjalankan pelayanan kesehatan di Posyandu wilayah, dilaksanakan oleh kader Posyandu.
- (3) Jumlah kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merangkap sebagai pengurus Posyandu tingkat wilayah.
- (5) Sasaran Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak bawah lima tahun (balita);
 - b. ibu hamil;
 - c. remaja; dan
 - d. lanjut usia.

- (6) Tujuan pembentukan Posyandu meliputi:
- a. mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, anak balita (balita) dan angka kelahiran;
 - b. mempercepat penerimaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS);
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kesehatan dan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
 - d. sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera;
 - e. memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi remaja;
 - f. memberikan pengetahuan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) bagi remaja;
 - g. sebagai wadah pembinaan dan memahami pentingnya gaya hidup sehat;
 - h. meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
 - i. meningkatkan kesadaran lanjut usia untuk membina sendiri kesehatannya;
 - j. meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam menghayati dan mengatasi masalah kesehatan lanjut usia secara optimal;
 - k. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lanjut usia; dan
 - l. meningkatkan jenis dan mutu pelayanan kesehatan lanjut usia.
- (7) Posyandu mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja;
 - b. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia/pengelola program;

- c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Lurah, instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- d. menganalisis masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- e. mengupayakan sumber-sumber pendanaan dalam mendukung operasional Posyandu;
- f. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan secara rutin dan terjadwal;
- g. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- h. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
- j. melaksanakan administrasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(8) Posyandu mempunyai fungsi:

- a. pemantau status tumbuh kembang balita;
- b. pemantau dan pencegah gangguan pertumbuhan balita;
- c. penyuluh gizi ibu dan pertumbuhan balita;
- d. perujukan balita ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- e. penyelenggara pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan;
- f. penyelenggara pemeliharaan kesehatan ibu dan anak;
- g. pelaksana pelayanan keluarga berencana;

- h. penyelenggara imunisasi dan peningkatan gizi.
- i. penyelenggara kegiatan yang memberikan pengetahuan mengenai kesehatan remaja; dan
- j. pelaksana kegiatan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lanjut usia.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 16

- (1) Susunan kepengurusan LKK, yaitu:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi/Bidang/Kelompok Kerja (Pokja) atau sebutan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah kepengurusan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan perkembangan, kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Kepengurusan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 17

- (1) Syarat Pengurus LKK sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berdomisili di Kalurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - e. tidak merangkap jabatan pada lembaga Pemerintahan Kalurahan, Pamong Kalurahan dan Anggota BPK;

- f. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - g. tidak merangkap jabatan pada LKK lainnya; dan
 - h. bersedia menjadi pengurus LKK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kalurahan.

Pasal 18

Pengurus LKK berkewajiban untuk :

- a. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. melaksanakan tugas dan fungsinya;
- d. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak terkait;
- e. menjaga norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; dan
- f. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dipandang perlu kepada Lurah untuk mendapatkan penyelesaian atau tindak lanjut.

Pasal 19

Pengurus LKK berhak untuk :

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah dalam rangka membantu kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kemasyarakatan;
- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai;
- c. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan mitra kerja sesuai fungsi dan tugasnya;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Kalurahan; dan
- e. mendapat fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.

Pasal 20

- (1) Pengurus LKK diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; dan
 - f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat kalurahan.
- (2) Dalam hal terdapat Pengurus LKK yang diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya, paling lambat 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian pengurus.

Pasal 21

- (1) Masa bakti Pengurus PKK 6 tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Masa bakti pengurus LKK selain PKK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus LKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjabat:
 - a. 3 (tiga) kali untuk secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut untuk Pengurus PKK; dan
 - b. 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut untuk LKK selain PKK.
- (5) Contoh bentuk format Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus LKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
AD/ART

Pasal 22

- (1) LKK menyusun AD/ART melalui mekanisme musyawarah mufakat.

- (2) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. azas dan tujuan;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. keanggotaan;
 - e. susunan pengurus;
 - f. tata cara pemilihan pengurus;
 - g. hak dan kewajiban pengurus;
 - h. masa bhakti pengurus;
 - i. mekanisme penggantian pengurus;
 - j. mekanisme pengambilan keputusan;
 - k. waktu penyelenggaraan musyawarah dan rapat-rapat;
 - l. pengelolaan keuangan;
 - m. mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan;
dan
 - n. pembinaan dan pengawasan;
- (3) Contoh bentuk Format AD/ART LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 23

- (1) Keanggotaan LKK terdiri dari masyarakat kalurahan setempat.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat perorangan dan/atau kelompok masyarakat.

BAB VIII
MEKANISME PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 24

- (1) Pembentukan Pengurus LKK dilakukan melalui musyawarah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART dengan mendasarkan pada Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan LKK

BAB IX
HUBUNGAN KERJA

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Pemerintahan Kalurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kalurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga di Kalurahan bersifat kemitraan.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) LKK dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kemitraan sosial dan/atau non sosial yang berorientasi keuntungan dengan LKK lainnya maupun pelaku usaha.

BAB XI
FORUM KOMUNIKASI LKK

Pasal 27

- (1) Dalam rangka koordinasi LKK antar Kalurahan antar Kapanewon dapat dibentuk forum komunikasi pada tingkat:
 - a. antar Kalurahan dalam Kapanewon; dan
 - b. antar Kalurahan dalam Kabupaten.
- (2) Kepengurusan dan susunan pengurus forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah antar LKK.
- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi/Bidang/Kelompok Kerja (Pokja) atau sebutan lain sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah kepengurusan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan perkembangan, kondisi dan kebutuhan.
- (5) Kepengurusan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (6) Keanggotaan forum komunikasi terdiri dari perwakilan keanggotaan LKK.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pemerintah Daerah, Panewu dan Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK.

Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- a. merumuskan kebijakan terkait LKK;
- b. melaksanakan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan supervisi serta konsultasi terhadap LKK;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK; dan
- d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan Panewu, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan yang berkaitan dengan LKK;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerja sama antar LKK; dan
- e. memfasilitasi kerja sama antar LKK dengan Pihak Ketiga;

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan Lurah, meliputi:

- a. menyusun Peraturan Kalurahan yang berkaitan dengan LKK;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
- c. memfasilitasi dana operasional dan pengembangan LKK;
- d. memfasilitasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. memfasilitasi peran aktif penyusunan perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh LKK;
- f. memfasilitasi kerja sama antar LKK dan kerja sama LKK dengan Pihak Ketiga; dan
- g. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan LKK dapat bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan administrasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara LKK.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) LKK yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian paling lambat pada bulan Desember Tahun 2020.
- (2) Pengurus LKK yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 Juni 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO


Diundangkan di Wates
pada tanggal 4 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 36

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,


MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 36 TAHUN 2020
 TENTANG
 LEMBAGA KEMASYARAKATAN
 KALURAHAN

A. CONTOH BENTUK FORMAT PERATURAN KALURAHAN TENTANG
 PEMBENTUKAN LKK



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
 KAPANEWON
 KALURAHAN.....

PERATURAN KALURAHAN
 NOMOR.....TAHUN 20.....

TENTANG
 PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, perlu adanya pedoman pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
 - b. bahwa agar pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dapat diterapkan secara aplikatif dan implementatif serta partisipatif perlu dilakukan penyelarasan dengan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
13.(peraturan yang terkait)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....

DAN

LURAH.....

KAPANEWON.....KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah, yang dipimpin oleh Panewu.
2. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.

3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah pedoman teknis operasional Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang dibentuk dan disusun berdasarkan Musyawarah Kalurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
11. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagai perwujudan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagai bagian wilayah administrasi kalurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kalurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagai bagian wilayah administrasi kalurahan yang terdiri dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMKal adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan dalam rangka menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan.

15. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan dalam rangka pembangunan masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan dalam rangka pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial, terutama generasi muda diwilayah Kalurahan/Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Kalurahan.
17. Pos Pelayanan Terpadu atau sebutan lain Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

20. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
21. Kapanewon adalah Kapanewon.....
22. Kalurahan adalah Kalurahan
Kapanewon.....

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Kalurahan ini adalah sebagai penetapan pembentukan LKK.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Kalurahan ini adalah :
 - a. untuk mengoptimalkan peran LKK dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - b. mendudukan fungsi LKK sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - c. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan kalurahan; dan
 - d. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Kalurahan ini dibentuk LKK Kapanewon..... Kabupaten Kulon Progo.
- (2) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

LKK berkedudukan sebagai mitra pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

- (1) LKK bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat kalurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK menyampaikan usulan rencana kegiatan kepada Pemerintah Kalurahan.
- (3) Tata cara penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme perencanaan di Kalurahan.

Pasal 6

LKK berfungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat kalurahan;

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV

LKK

Bagian Kesatu

RT

Pasal 7

- (1) RT merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (2) Tujuan pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. melestarikan nilai-nilai budaya gotong royong di masyarakat;
 - b. memelihara nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. membantu serta meningkatkan kinerja pemerintah di wilayah Kalurahan;
 - d. meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah kalurahan; dan
 - e. menjadi sarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat yang ada.

- (3) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari wilayah administrasi di Kalurahan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh RT, Pemerintah Kalurahan wajib melakukan pemetaan wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RT mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. membantu dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - c. membantu pelaksanaan pendataan kependudukan;
 - d. membantu pelayanan administrasi pemerintahan;
 - e. membantu penyelesaian permasalahan masyarakat;
 - f. membantu terwujudnya ketentraman dan ketertiban;
 - g. mengembangkan aspirasi masyarakat dan memotivasi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengikuti dan menyampaikan pendapat pada forum rapat musyawarah RT;
 - h. mengoordinasikan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan;
 - i. menghubungkan antar warga masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Kalurahan dan/atau Pemerintah Daerah melalui pertemuan yang dihadiri kepala keluarga di wilayah RT setempat untuk menyampaikan dan menerima informasi pembangunan;

- j. menggerakkan gotong royong, potensi swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - k. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
 - l. melaksanakan pengelolaan administrasi kelembagaan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (6) RT mempunyai fungsi meliputi:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kedua

RW

Pasal 8

- (1) RW merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi RT.
- (2) RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari wilayah administrasi di Kalurahan.
- (3) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh RW, Pemerintah Kalurahan wajib melakukan pemetaan administrasi RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Tujuan pembentukan RW yaitu :
- a. melestarikan nilai-nilai budaya gotong royong di masyarakat;
 - b. memelihara nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. membantu serta meningkatkan kinerja pemerintah di wilayah kelurahan;
 - d. meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah kelurahan; dan
 - e. menjadi sarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat yang ada.
- (5) RW mempunyai tugas meliputi:
- a. menyusun rencana kerja;
 - b. membantu pelayanan administrasi pemerintahan;
 - c. membantu dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas RT diwilayahnya;
 - e. mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan melalui rapat/musyawarah antar pengurus RT yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan dan BPK;
 - f. menghubungkan antar warga masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Daerah;
 - g. memotivasi RT di wilayahnya dalam rangka menggerakkan gotong royong, potensi swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi kelembagaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

- (6) RW mempunyai fungsi meliputi :
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Ketiga

LPMKal

Pasal 9

- (1) LPMKal merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kalurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dengan swadaya gotong-royong.
- (2) Tujuan pembentukan LPMKal yaitu untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan.
- (3) LPMKal mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Padukuhan;
 - c. mengikuti penyusunan rencana pembangunan kalurahan;
 - d. mengkoordinasikan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan dengan swadaya, partisipasi dan gotong royong;

- e. mengidentifikasi, menginventaris dan melaporkan rencana swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 - f. membantu melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi kelembagaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (4) LPMKal mempunyai fungsi meliputi:
- a. pendorong rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - b. pengkoordinasi perencanaan pembangunan di tingkat Padukuhan;
 - c. pengkoordinasi kegiatan antar LKK dalam pemberdayaan dan pembangunan;
 - d. perencana aktif dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
 - e. penggalian potensi dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mendukung pembangunan di Kalurahan.

Bagian Keempat

PKK

Pasal 10

- (1) PKK merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui Gerakan PKK.
- (2) Penyelenggaraan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK.

- (3) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.
- (4) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
- (5) PKK mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK di Padukuhan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - d. melaksanakan kegiatan penyuluhan yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - e. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - f. mengikuti secara aktif pelaksanaan program Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kalurahan;

- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
 - h. melaksanakan administrasi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (6) PKK mempunyai fungsi meliputi:
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. perencana, pelaksana, fasilitator, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Kelima Karang Taruna

Pasal 11

- (1) Karang Taruna merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (2) Tujuan pembentukan Karang Taruna yaitu:
- a. mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
 - b. membentuk jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
 - c. menumbuhkan potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna;

- d. memotivasi setiap generasi muda Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. menjalin kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. mewujudkan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Kalurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya; dan
- g. mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Kalurahan yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan bersama Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

(3) Karang Taruna mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
- d. melaksanakan administrasi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(4) Karang Taruna mempunyai fungsi meliputi:

- a. pencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. penyelenggara kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat terutama generasi muda;

- c. peningkatan usaha ekonomi produktif;
- d. penumbuh, pemerkuat dan pemelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. penumbuh, pemerkuat dan pemelihara kearifan lokal; dan
- f. pemelihara dan pemerkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keenam

Posyandu

Pasal 12

- (1) Posyandu merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat kalurahan.
- (2) Dalam menjalankan pelayanan kesehatan di Posyandu wilayah, dilaksanakan oleh kader Posyandu.
- (3) Jumlah kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merangkap sebagai pengurus posyandu tingkat wilayah.
- (5) Sasaran Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak bawah lima tahun (balita);
 - b. ibu hamil;
 - c. remaja; dan
 - d. lanjut usia.
- (6) Tujuan pembentukan Posyandu:
 - a. mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, anak bawah lima tahun (balita) dan angka kelahiran;

- b. mempercepat penerimaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS);
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kesehatan dan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
 - d. sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera;
 - e. memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi remaja;
 - f. memberikan pengetahuan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) bagi remaja;
 - g. sebagai wadah pembinaan dan memahami pentingnya gaya hidup sehat;
 - h. meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
 - i. meningkatkan kesadaran lanjut usia untuk membina sendiri kesehatannya;
 - j. meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam menghayati dan mengatasi masalah kesehatan lanjut usia secara optimal;
 - k. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lanjut usia; dan
 - l. meningkatkan jenis dan mutu pelayanan kesehatan lanjut usia.
- (7) Posyandu mempunyai tugas meliputi:
- a. menyusun rencana kerja;
 - b. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/pengelola program;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Lurah, instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;

- d. menganalisis masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - e. mengupayakan sumber-sumber pendanaan dalam mendukung operasional Posyandu;
 - f. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan secara rutin dan terjadwal;
 - g. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - h. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
 - j. melaksanakan administrasi; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah
- (8) Posyandu mempunyai fungsi meliputi:
- a. pemantau status tumbuh kembang balita;
 - b. pemantau dan pencegah gangguan pertumbuhan balita;
 - c. penyuluh gizi ibu dan pertumbuhan balita;
 - d. perujuk balita ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - e. penyelenggara pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan;
 - f. penyelenggaraeliharaan kesehatan ibu dan anak;
 - g. pelaksana pelayanan keluarga berencana;

- h. penyelenggara imunisasi dan peningkatan gizi;
- i. penyelenggara kegiatan yang memberikan pengetahuan mengenai kesehatan remaja; dan
- j. pelaksana kegiatan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lanjut usia;

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 13

- (1) Susunan kepengurusan LKK, terdiri :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi/Bidang/Kelompok Kerja (Pokja) atau sebutan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah kepengurusan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan perkembangan, kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Kepengurusan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 14

- (1) Syarat Pengurus LKK adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berdomisili di Kalurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;

- e. tidak merangkap jabatan pada lembaga pemerintahan kalurahan, Pamong Kalurahan dan Anggota BPK;
 - f. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - g. tidak merangkap jabatan pada LKK lainnya; dan
 - h. bersedia menjadi pengurus LKK.
- (2) Pengangkatan Pengurus LKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 15

Pengurus LKK berkewajiban untuk :

- a. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. melaksanakan tugas dan fungsinya;
- d. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak terkait;
- e. menjaga norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; dan
- f. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dipandang perlu kepada Lurah untuk mendapatkan penyelesaian atau tindak lanjut;

Pasal 16

Pengurus LKK berhak untuk :

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah dalam rangka membantu kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kemasyarakatan;

- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai;
- c. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan mitra kerja sesuai fungsi dan tugasnya;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kalurahan; dan
- e. mendapat fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai kemampuan keuangan kalurahan.

Pasal 17

- (1) Pengurus LKK diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; dan
 - f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat kalurahan.
- (2) Dalam hal terdapat Pengurus LKK yang diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya, paling lambat 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian pengurus.

Pasal 18

- (1) Masa bakti Pengurus PKK 6 tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Masa bakti Pengurus LKK selain PKK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus LKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjabat :
- a. 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut untuk Pengurus PKK
 - b. 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut untuk LKK selain PKK.

BAB VI AD/ART

Pasal 19

- (1) LKK menyusun AD/ART melalui mekanisme musyawarah mufakat.
- (2) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. waktu pembentukan dan kedudukan;
 - c. waktu Pembentukan;
 - d. keanggotaan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. tata cara pemilihan pengurus;
 - g. mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - h. mekanisme pengambilan keputusan;
 - i. waktu penyelenggaraan musyawarah dan rapat – rapat;
 - j. pengelolaan keuangan;
 - k. Susunan Pengurus

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 20

- (1) Keanggotaan LKK terdiri dari masyarakat kalurahan setempat.

- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat perorangan dan/atau kelompok masyarakat.

BAB VIII

MEKANISME PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 21

Pembentukan Pengurus LKK dilakukan melalui musyawarah dengan mendasarkan pada AD/ART masing-masing LKK.

BAB IX

HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Pemerintahan Kalurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kalurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga di Kalurahan bersifat kemitraan.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) LKK dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kemitraan sosial dan/atau non sosial yang berorientasi keuntungan dengan LKK lainnya maupun pelaku usaha.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Lurah, meliputi :
 - a. menyusun Peraturan Kalurahan yang berkaitan dengan LKK;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
 - c. memfasilitasi dana operasional dan pengembangan LKK;
 - d. memfasilitasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. memfasilitasi peran aktif penyusunan perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh LKK;
 - f. memfasilitasi kerja sama antar LKK dan kerja sama LKK dengan pihak ketiga; dan
 - g. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan LKK dapat bersumber dari:
 - a. Swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pengelolaan administrasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara LKK.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) LKK yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Kalurahan ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian paling lambat pada bulan Desember Tahun 2020.
- (2) Pengurus LKK yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Kalurahan ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Kulon Progo
Pada tanggal
LURAH

B. CONTOH BENTUK FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMECAHAN RT

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMECAHAN RUKUN TETANGGA ... /... KALURAHAN.....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah pemecahan Rukun Tetangga ... / Rukun Warga ... Kalurahan ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Rukun Tetangga.../Rukun Warga ... Kalurahan ... dipecah menjadi Rukun Tetangga .../Rukun Warga ...dan Rukun Tetangga.../Rukun Warga...

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan.
Lurah

Pimpinan Musyawarah

.....

.....

C. CONTOH BENTUK FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
PENGGABUNGAN RT

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PENGGABUNGAN RUKUN
TETANGGA ...DAN RUKUN TETANGGA/ RUKUN WARGA
KALURAHAN.....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah penggabungan Rukun Tetangga dan Rukun Tetangga/ Rukun Warga Kalurahan.

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Rukun Tetangga...Rukun Warga...Kalurahan ... digabung dengan Rukun Tetangga ... Rukun Warga...dan mengusulkan penghapusan Rukun Tetangga

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan.
Lurah

Pimpinan Musyawarah

.....

.....

D. CONTOH BENTUK FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMECAHAN RW

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMECAHAN RUKUN WARGA ...
KALURAHAN.....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah pemecahan Rukun Warga ... / Kalurahan ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Rukun Warga ... Kalurahan ... dipecah menjadi Rukun Warga ... dan Rukun Warga....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan.

Pimpinan Musyawarah

Lurah

.....

.....

E. CONTOH BENTUK FORM BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
PENGABUNGAN RW

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PENGABUNGAN RUKUN
WARGA ... DAN RUKUN WARGA... KALURAHAN.....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah penggabungan Rukun Warga ...dan Rukun Warga Kalurahan...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Rukun Warga...Kalurahan ... digabung dengan Rukun Warga ...Kalurahan.....dan mengusulkan penghapusan Rukun Warga

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan.
Lurah

Pimpinan Musyawarah

.....

.....

F. CONTOH BENTUK FORM LAPORAN RENCANA SWADAYA MASYARAKAT

Rencana Swadaya Masyarakat KalurahanTahun Anggaran

No	Kegiatan	Lokasi			Bentuk Rencana Swadaya	Nilai Rencana Swadaya (Rp)
		Padukuhan	RW	RT		
1						
2						
3						
dst						
Total						

Ketua LPMkal

.....

G. CONTOH BENTUK FORM LAPORAN REALISASI SWADAYA MASYARAKAT

Realisasi Swadaya Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran

No	Kegiatan	Lokasi			Bentuk Realiasi Swadaya	Nilai Realiasi Swadaya (Rp)
		Padukuhan	RW	RT		
1						
2						
3						
dst						
Total						

Ketua LPMkal

.....

H. CONTOH BENTUK FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LKK



LURAH
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS(Jenis LKK)
KALURAHAN..... KAPANEWON KABUPATEN
KULON PROGO
MASA BHAKTI -

LURAH

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil musyawarah pemilihan pengurus (jenis LKK) Kalurahan..... Kapanewon ... Masa Bakti, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah....., Kapanewon Kabupaten Kulon Progo tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Masa Bhakti.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan; dan
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
14. Peraturan Kalurahan Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
15. (peraturan yang terkait)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan pengurus..... (Jenis LKK) Kapanewon
Kabupaten Kulon Progo Masa
 Bhakti.....sebagaimana terlampir dan merupakan
 bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : LKK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
 merupakan wadah partisipasi masyarakat Kalurahan sebagai
 mitra kerja pemerintah Kalurahan dalam

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan
 Lurah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Kalurahan Tahun Anggaran.....;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan;

Ditetapkan di Kalurahan
 pada tanggal, bulan tahun

.....

LURAH,

.....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS(JENIS LKK)

KALURAHAN.....KAPANEWON

.....MASA BHAKTI- (TAHUN)

SUSUNAN PENGURUS(Jenis LKK)

KALURAHAN.....

KAPANEWON, KABUPATEN KULON PROGO

Masa Bhakti- (tahun)

NO	NAMA	JABATAN
1		Ketua
2		Sekretaris
3		Bendahara
4		Ketua Seksi / Pokja / Bidang.....
5		Anggota
6		Anggota
7		Anggota
8		Anggota
9		Ketua Seksi / Pokja / Bidang.....
10		Anggota
11		Anggota
12		Anggota
13		Ketua Seksi / Pokja / Bidang.....
14		Anggota
15		Anggota
16		Anggota
17		Anggota
18		Anggota
19		Anggota

	
--	-------	--

LURAH

.....

.....

I. CONTOH BENTUK FORMAT AD/ART LKK

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)

..... (Jenis LKK)

KALURAHAN KAPANEWON

KABUPATEN PROVINSI

BAB I

VISI dan MISI

Pasal 1

Visi(Jenis LKK) adalah

Pasal 2

Misi(Jenis LKK) adalah

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

.....(Jenis LKK) ini bernama "..... "

Pasal 4

..... (Nama LKK) berkedudukan di Kalurahan
Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa
Yogyakarta.

BAB III

AZAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 5

..... (nama LKK) berazaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.

Pasal 6

..... (nama LKK) berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan dan keputusan musyawarah anggota sebagai landasan operasional.

Pasal 7

Tujuan(Jenis LKK) meliputi:

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Tugas(Nama LKK) meliputi:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.; dan
- e.

Pasal 9

Fungsi(Nama LKK) meliputi:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.; dan
- e.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 10

Keanggotaan(jenis LKK) terdiri atas masyarakat kelurahan setempat dan/atau kelompok masyarakat.

BAB VI HAK ANGGOTA

Pasal 11

Setiap anggota mempunyai hak :

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam musyawarah;
- b. memilih dan atau dipilih menjadi pengurus..... (Jenis LKK);
- c. mendapat keterangan mengenai perkembangan.....(Jenis LKK) menurut ketentuan yang berlaku;
- d. mengikuti kegiatan(Jenis LKK) dan memperoleh fasilitas organisasi;
- e. mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lain;
- f. melakukan pengawasan atas berjalannya..... (Jenis LKK) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g.

BAB VII KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 12

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh..... (Jenis LKK);
- c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan;
- d. menghadiri rapat anggota dan secara aktif mengambil bagian dalam rapat tersebut;
- e. menepati setiap perjanjian dengan kelompok;
- f. menjaga nama baik (jenis LKK).

BAB VIII
RAPAT/MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 13

- (1) Rapat/musyawarah anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam (Jenis LKK)
- (2) Rapat/Musyawarah Anggota dilaksanakan setiap satu bulan sekali guna menyampaikan:
 - a. laporan tentang perkembangan..... (Jenis LKK)
 - b. laporan keuangan..... (Jenis LKK); dan/atau
 - c. lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Selain hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas apabila perlu pengurus berhak:
 - a. mengadakan rapat anggota mendadak apabila diperlukan; dan/atau
 - b. rapat anggota mendadak dianggap sah apabila paling kurang 1/3 (sepertiga) anggota hadir dan menginginkan diadakannya rapat anggota mendadak.
- (4) Rapat anggota sah apabila dihadiri paling kurang setengah dari jumlah anggota
- (5) Rapat anggota dipimpin oleh Ketua, apabila tidak hadir maka yang hadir memilih salah seorang untuk memimpin rapat.
- (6) Keputusan rapat diambil secara mufakat.
- (7) Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perubahan dan perbaikan dikemudian hari sesuai keputusan rapat anggota.
- (8) Keputusan berlaku sejak ditetapkan.

BAB IX
KEPENGURUSAN

Pasal 14

- (1) Untuk mengelola (jenis LKK) Kalurahan Kapanewon dibentuk pengurus yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi / Bidang / Pokja.

(2) Seksi–seksi / Bidang / Pokja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Seksi–seksi / Bidang / Pokja
- b. Seksi–seksi / Bidang / Pokja
- c.

Pasal 15

Syarat – syarat menjadi pengurus:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di Kalurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- e. tidak merangkap jabatan pada lembaga pemerintahan kalurahan, Pamong Kalurahan dan Anggota BPK;
- f. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
- g. tidak merangkap jabatan pada LKK lainnya;
- h. bersedia menjadi pengurus LKK; dan
- i.

BAB X

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 16

- a. Pemilihan Ketua (Jenis LKK) dilaksanakan dengan pemilihan langsung melalui musyawarah anggota.
- b. Pembentukan pengurus dilaksanakan oleh formatur.
- c. Formatur terdiri dari Ketua terpilih dan dibantu oleh anggota formatur dari peserta musyawarah.
- d. Formatur membentuk kelengkapan pengurus dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- e.

BAB XI
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 17

(1) Kewajiban Pengurus:

- a. mengelola organisasi dengan penuh tanggung jawab;
- b. melaksanakan semua keputusan rapat anggota;
- c. mengoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program kerja;
- d. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota.
- e. bersikap adil, bijaksana dan objektif;
- f. bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan dari segala risiko kekeliruan atas pekerjaannya;
- g. bersedia meletakkan jabatan apabila terbukti melakukan kesalahan atau habis masa jabatannya; dan
- h.

(2) Hak Pengurus:

- a. mengundurkan diri.
- b. mengadakan rapat istimewa apabila dipandang perlu dan diizinkan oleh pelindung ataupun penasihat.
- c.

BAB XII
MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 18

- (1) Pergantian pengurus yang telah habis masa bhakti dan/atau berhalangan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16.
- (2) Pergantian pengurus antar waktu dapat dilaksanakan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah;
 - d. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas; atau
 - e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kemasyarakatan.

- (3) Apabila salah satu pengurus (Jenis LKK) berhalangan sementara atau tetap maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah 1 (satu) pengurus yang ditunjuk.

BAB XIII

MASA JABATAN PENGURUS

Pasal 19

- (1) Masa bakti Pengurus(Jenis LKK) selama tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus(Jenis LKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pengurus(Jenis LKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan(Jenis LKK) dapat bersumber dari:
- Swadaya masyarakat;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan administrasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara LKK.

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan dalam rapat anggota.
- (2) Setiap anggota berhak memberikan masukan atau saran terhadap perubahan anggaran.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Lurah

BAB

.....

Pasal

.....

Ditetapkan di,..... 20....

Sekretaris

Ketua

.....

.....

Mengetahui / Mengesahkan
Lurah

.....

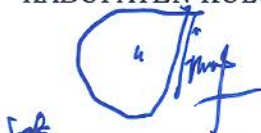
Wates, 4 Juni 2020

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003